

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI Di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten kutai Barat

Beni Cuan Patama¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kampung Ngenyan Asa. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya belum optimal, dalam menghadapi masalah kemiskinan yang cukup kompleks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) pada dasarnya adalah gerakan nasional dalam pembangunan yang berbasis pada masyarakat yang menjadi acuan dan pedoman pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif: yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan sistematis terhadap fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu dengan cermat dan faktual. Sedangkan, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan penelitian dokumen..

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (interactive model of analisis) yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman (2007). Adapun hasil penelitian yang diperoleh ialah Program PNPM di Kampung Ngenyan Asa yang terdiri dari koperasi simpan pinjam perempuan, pendidikan TK, pembuatan jalan Kampung dapat dikatakan dalam persiapannya tergolong bagus, namun dalam hal pelaksanaannya kurang lancar atau kurang efektif.

Kata Kunci: PNPM, Kampung Ngenyan Asa, Kabupaten Kutai Barat

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:benny.ben89@yahoo.com

Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan adalah pernyataan-pernyataan atau pengertian-pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan yang fungsinya adalah menandai lingkungan sekitar yang dibuat sehingga memberikan jaminan bahwa keputusan-keputusan itu akan sesuai dengan tercapainya tujuan (Hasibuan, 1996)

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kebijaksanaan merupakan suatu pedoman yang menyeluruh guna mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Kebijaksanaan juga merupakan suatu rencana yang mengarah pada daya pikir dari pengambilan keputusan kearah tujuan yang diinginkan. Kebijakan mungkin terjadi dan berasal dari seperangkat keputusan yang tampaknya tetap untuk hal-hal yang sama. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain karena sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian dari anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap hidup dalam kemiskinan. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Kepemimpinan Kebijakan merupakan bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan ketetapan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu Kebijakan Pemerintah adalah dengan adanya Program PNPM.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian.

Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 .
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang Kelurahan.
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
3. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara.

Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri sudah banyak program-program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan, seperti pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Hingga saat ini bangsa Indonesia juga belum benar-benar terlepas dari kemiskinan sejak krisis berkepanjangan. Disamping itu, terlepas dari kemiskinan merupakan bagaikan mimpi surga, karena kemiskinan tidak dapat dihilangkan, namun hanya dapat dikurangi. Oleh karena itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sebagai prioritas mendesak, khususnya terhadap masyarakat pedesaan.

Ada beberapa alasan mengapa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menarik untuk dibahas *Pertama*, masalah kemiskinan adalah permasalahan global yang hampir dialami oleh semua Negara di dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji guna menemukan solusi penanggulangannya, khususnya di Desa Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Alasan *kedua* mengapa PNPM Mandiri Perdesaan dianggap sebagai solusi terbaru dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan setelah program-program pemerintah yang sebelumnya dianggap kurang atau tidak mampu

menekan dengan maksimal angka kemiskinan di Indonesia, dalam hal ini termasuk program pengentasan kemiskinan di Desa Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Disamping itu juga, sisi menarik dari PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yaitu untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan maksimal seperti apa yang menjadi tujuan, prinsip, dan sasaran.

Kabupaten Kutai Barat mulai berpartisipasi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM PPK) pada tahun 2007, dengan jumlah Kecamatan yang berpartisipasi 7 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Barong Tongkok, Muara Pahu, Penyinggahan, Damai, Tering, Mook Manaar bulatn, Linggang bigung dan desa yang berpartisipasi dalam tahapan Program berjumlah 98 Kampung dengan pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat sejumlah komposisi pembiayaan Cost Sharing APBD 70% dan Cost Sharing APBN 30% yang pada bulan September 2009 ini telah memasuki tahapan Pemeliharaan dan pelestarian. Dengan perincian sebagai berikut: pada tahun 2007 dalam PNPM-PPK, Lokasi 7 (tujuh) kecamatan mendapat alokasi bantuan (41,55%) dana BLM digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana. Sedangkan sisanya untuk kegiatan ekonomi (SPP) yakni sebesar, kesehatan 11.40% dan Pelatihan Masyarakat 0.21%.

Tahun 2008 jumlah Kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM-Mandiri Perdesaan bertambah 2 Kecamatan yaitu Long Bagun dan Nyuatan sehingga menjadi 9 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat pada fase Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) TA. 2008. Saat ini memasuki tahapan Pelaksanaan, MDST, dan pemeliharaan serta pelestarian, pendanaan Cost Sharing 50% APBD dan 50% APBN dengan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk TA.

Penelitian ini akan dilakukan di Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena daerah ini merupakan salah satu dari desa yang menerima dana PNPM Mandiri Perdesaan.

Pelaksanaan Program

Dalam buku pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri, (2008:1), Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diperlukan suatu lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja produktif dan peningkatan ekonomi produktif masyarakat. Keberadaan lembaga masyarakat yang kokoh dapat dicapai apabila lembaga tersebut benar-benar mengakar, representative dan dipercaya oleh masyarakat di wilayahnya, sehingga mampu mengorganisir dan menjadi wadah masyarakat untuk bersinergi sekaligus menggali potensi yang ada untuk mengatasi persoalan kemiskinan di wilayahnya.

Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan program PNPM Depdagri (2007: 5) meliputi: (www.pnpm-mandiri.org)

1. Keberpihakan kepada orang miskin mengandung makna yaitu orientasi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan harus ditujukan bagi penduduk miskin.
2. Keberpihakan kepada perempuan mengandung makna bahwa program ini memberikan akses atau kesempatan yang luas bagi kaum perempuan, terutama dari kelompok miskin untuk berpartisipasi pada setiap tahapan yang akan dilaksanakan.
3. Kepedulian kepada masa depan anak-anak yaitu mengandung makna bahwa, program ini memberikan perhatian yang sangat besar pada kondisi dan masa depan pendidikan dan kesehatan anak-anak bagi perkembangan mereka, terutama sekali mereka yang berasal dari anggota rumah tangga miskin.
4. Transparansi mengandung makna bahwa seluruh kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat dan pelaku program yang berdomisili di desa dan kecamatan harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan program serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
5. Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat ataupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati.
6. Partisipasi yaitu melalui program ini, masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dana maupun barang yang dimilikinya secara sukarela.
7. Desentralisasi yaitu pemerintah lokal bersama masyarakat mempunyai tanggungjawab bersama dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesehatan bagi kelompok penduduk miskin.

Nilai-nilai yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program PNPM Depdagri (2007: 12) meliputi:

1. Kejujuran, mengandung makna setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana, dan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan jujur tanpa adanya upaya rekayasa dan manipulasi yang dapat merugikan masyarakat miskin.
2. Kesetaraan, Setiap tahapan program terbuka bagi keterlibatan seluruh warga masyarakat, tanpa membedakan latar belakang, asal-usul, agama, status, jenis kelamin dan lainnya. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Kerelawanan yaitu keterlibatan dalam setiap kegiatan, semata-mata dilandaskan pada keikhlasan untuk membantu peningkatan

kesejahteraan masyarakat miskin, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok.

4. Keadilan yaitu setiap keputusan yang diambil harus menekankan asas keadilan yang didasarkan pada kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin.
5. Keuletan yaitu seluruh kegiatan dilandasi oleh semangat kerja keras dan tidak mudah putus asa, untuk membantu masyarakat miskin.

Dalam melaksanakan program PNPM Mandiri meliputi dua katagori: (1) PNPM Inti: terdiri dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK. (2) PNPM-penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Cakupan program ini merupakan cakupan masa transisi (2008) dimana rancangan pada tahun 2009 akan menjadi program yang terintegrasi dalam suatu program PNPM.

Selama ini, masing-masing program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari semua sektor berjalan secara parsial. Satu program dan program lain tidak ada keterkaitan, sehingga efektifitasnya kurang dapat di rasakan oleh masyarakat penerima. Pada masing-masing program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, terdapat komponen kegiatan yang sama seperti sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, supervisi, dan sebagainya sehingga menimbulkan efisiensi dana, waktu dan tenaga karena terjadi duplikasi.

Tujuan umum PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Serta tujuan khususnya meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya local.
3. Menembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang di prioritaskan oleh masyarakat.
5. Mengembangkan pengelolaan dana bergilir.
6. Mendorong dan terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
7. Mengembangkan pengembangan antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

1. Pengembangan Masyarakat. Komponen Pengembangan Masyarakat
2. Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal
3. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau sering disebut PNPM generasi menurut Depdagri (2007: 12) adalah program fasilitasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.

Dalam buku pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri, (2008:1), Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diperlukan suatu lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja produktif dan peningkatan ekonomi produktif masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tingkat Nasional

Penanggung jawaban masyarakat pengelolaan program tingkat nasional PNPM Mandiri Perkotaan adalah departemen pekerjaan umum yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (*executing agency*). Untuk melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan terciptanya sinergi dengan program lainnya untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam rangka keberlanjutan program sekaligus mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan), telah dibentuk Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP) sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 358/KPTS/M/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tingkat Provinsi

Di tingkat propinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melalui Bapeda Propinsi dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Propinsi. Sebagai pelaksana ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Ke-Cipta Karya-an di bawah kendali/koordinasi Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) PBL tingkat propinsi.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tingkat Kota/Kabupaten

Di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan langsung oleh Walikota/Bupati setempat melalui Bapeda Kabupaten/Kota dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP) yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota. TKPKD Kota/ Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan berperan mengkoordinasikan TKPP dari berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah Camat dan perangkatnya, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut: Camat Peran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya,

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tingkat Kelurahan/Desa

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan adalah (1) Lurah/Kades dan perangkatnya, (2) Relawan masyarakat, (3) LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), (4) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut: peran utama Kepala Kelurahan/Lurah dan Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat tercapai dengan baik.

Untuk Itu Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a) Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa dan Rembug Kesiapan Masyarakat yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan;
- b) Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KMW/Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya (Community Self Survey) dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat;

- d) Memfasilitasi proses pembentukan LKM. (Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan PNPM Mandiri Pedesaan);
- e) Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan rencana tahunannya oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat setempat (LKM);
- f) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan;
- g) Memfasilitasi PJM Pronangkis sebagai program kelurahan/desa untuk dibahas didalam Musrenbang kelurahan/desa;
- h) Memberi laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan diwilayahnya kepada Camat; dan
- i) Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di wilayah kerjanya.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Seperti yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 15-20) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi, antara lain :

1. *Reduksi data* (Penyederhanaan data)
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian (*focus*), menterjemahkan dengan membuat catatan mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
2. *Data Display* (Penyajian Data)
Display data / Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini untuk memahami peristiwa yang terjadi dalam mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasar pemahaman.
3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan)
Conclusion Drawing / penarikan kesimpulan yaitu makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi

yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum empiris.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temua baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok.

Persiapan, Penyelesaian, Penilaian Program Koperasi Simpan Pinjam Perempuan

Pada tahap persiapan program koperasi simpan pinjam perempuan, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan penjelasan mengenai simpan pinjam perempuan, hingga peraturan yang ada. Kemudian, pada tahap penyelesaian Program koperasi simpan pinjam perempuan, ternyata telah berjalan sesuai dengan tahap persiapan yang ada, yaitu dari penerimaan dana, sampai dengan penyaluran dana pada anggota koperasi simpan pinjam.

Namun, pada evaluasi program koperasi simpan pinjam ternyata kurang baik disebabkan pada pelaksanaan kegiatan, yaitu tidak digunakannya dana koperasi simpan pinjam tersebut untuk kegiatan usaha tetapi digunakan oleh pemanfaat untuk keperluan lain yang bukan untuk usaha. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penunggakan pinjaman koperasi simpan pinjam tersebut. Karena para penunggak tersebut tidak bisa mengembalikan pinjaman.

Persiapan, Penyelesaian, Penilaian Program Pendidikan TK

Pada persiapan program pendidikan TK telah dilaksanakan melalui tahap musyawarah kepada masyarakat. Adapun penyelesaian dan evaluasi Program Pendidikan TK yang telah di dipersiapkan dalam program PNPM di desa Ngenyan Asa, namun tidak terealisasi dengan baik dikarenakan tidak adanya anggaran yang dapat untuk membuat pembangunan TK, di samping itu telah berdirinya 2 unit TK milik yayasan yang ada desa Ngenyan Asa.

Persiapan, Penyelesaian, Penilaian Program Pembuatan Jalan

Persiapan program pembuatan jalan, yakni membicarakan bersama tentang ukuran dan batas pembagunan jalan yang akan dilaksanakan dalam hal penyelesaian program pembuatan jalan tidak sesuai dengan ukuran dan batas yang telah di sepakati pada tahap persiapan program pembuatan adapun, evaluasi

program pembuatan jalan di mana masyarakat masih kurang berpartisipasi sehingga hasil dari tahap persiapan pembangunan jalan masih kurang terealisasi

Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan mengenai studi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok:

Persiapan program koperasi simpan pinjam perempuan melalui sosialisasi kepada masyarakat, memberikan penjelasan mengenai simpan pinjam perempuan, hingga peraturan yang ada. Penyelesaian Program koperasi simpan pinjam perempuan, ternyata telah berjalan sesuai dengan tahap persiapan yang ada, yaitu dari penerimaan dana, sampai dengan penyaluran dana pada anggota koperasi simpan pinjam. Evaluasi program koperasi simpan pinjam ternyata kurang baik disebabkan pada pelaksanaan kegiatan, yaitu tidak digunakannya dana koperasi simpan pinjam tersebut untuk kegiatan usaha tetapi digunakan oleh pemanfaat untuk keperluan lain yang bukan untuk usaha. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penunggakan pinjaman koperasi simpan pinjam tersebut. Karena para penunggak tersebut tidak bisa mengembalikan pinjaman.

Persiapan program pendidikan TK telah dilaksanakan melalui tahap musyawarah kepada masyarakat. Penyelesaian dan evaluasi Program Pendidikan TK yang telah di dipersiapkan dalam program PNPM di desa Ngenyan Asa tidak terealisasi dengan alasan tidak adanya anggaran yang dapat untuk membuat pembangunan TK, di samping itu telah berdirinya 2 unit TK milik yayasan yang ada desa Ngenyan Asa. Persiapan program pembuatan jalan, yakni membicarakan bersama tentang ukuran dan batas pembagunan jalan yang akan dilaksanakan.

Penyelesaian program pembuatan jalan tidak sesuai dengan ukuran dan batas yang telah di sepakati pada tahap persiapan program pembuatan. Evaluasi program pembuatan jalan di mana masyarakat masih kurang berpartisipasi sehingga hasil dari tahap persiapan pembangunan jalan masih kurang terealisasi.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Anderson, James E. 1979.

Akbar, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Nusa Indah, Jakarta.

Brataatmaja 1994. *Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi Di Sekolah Dasar: Kebijakan, Implementasi*

Edwards, Gorge, 1980 *Implemeting Public Policy*, Washington DC: Texas A & M University, Congressioanal Quarterly Press.

- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora Utama, Bandung.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tika, Pabundu. 2006. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, Husaini dan P. Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Matthew B. Milles Dan A. Michael Huberman, 1997, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia (VI Press), Jakarta.
- Meter, Donald Van and Horn, Carl E Van 2007, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Administration and Society.
- Wahab, Abdul, 2008 *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber- sumber lain:

- Tim Penyusun , 2007. *Pedoman PNPM Mandiri*. Jakarta.
www.pnpm-mandiri.org, diakses 17 Januari 2012